

Implementasi APBN Berkelanjutan di Indonesia: Studi Konseptual dan Empiris

Badiul Hadi

Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk transparansi Anggaran Seknas FITRA
hadibadiul@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explore the concept of a sustainable State Budget (APBN) that supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. A qualitative approach with a literature study or desk-document method was used to analyze the implementation of sustainable state budgets in various countries. Data was collected through a literature review that included journal articles, policy reports, and official documents from countries that have implemented this principle. The results show that sustainable state budgets must consider environmental, social and economic aspects, and integrate ESG (environmental, social and governance) principles in development planning and budgeting. Some implementation challenges are inter-sectoral coordination, measurement of relevant indicators, and accurate reporting. This study concludes that the application of ESG principles in the state budget and budget policies that support the energy transition can accelerate the achievement of SDGs and ensure future fiscal sustainability.

Keywords : *Sustainable state budget, Sustainable development goals, energy transition, ESG principles.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkelanjutan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau desk-dokumen digunakan untuk menganalisis implementasi APBN berkelanjutan di berbagai negara. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang mencakup artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari negara-negara yang telah menerapkan prinsip ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBN berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta mengintegrasikan prinsip ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Beberapa tantangan implementasi koordinasi antar sektor, pengukuran indikator yang relevan, dan pelaporan yang akurat. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam APBN dan kebijakan anggaran yang mendukung transisi energi dapat mempercepat pencapaian SDGs dan memastikan keberlanjutan fiskal di masa depan.

Kata kunci: *APBN berkelanjutan, tujuan pembangunan, transisi energi, prinsip ESG.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi persoalan perubahan iklim yang berdampak besar pada semua aspek kehidupan. Gagasan mengenai transformasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan semakin mendapat perhatian. Isu keberlanjutan kini menjadi fokus global, dan semua agenda negara diarahkan untuk menangani dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan ekonomi. Karena itu, negara-negara di seluruh dunia berusaha mewujudkan keberlanjutan dengan berbagai strategi. Banyak negara mulai meninggalkan penggunaan energi fosil yang tidak ramah lingkungan, dan beralih ke pengembangan serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBET).

Selain itu, negara-negara juga mulai merancang tata kelola keuangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Promosi dan kampanye integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem perencanaan dan penganggaran semakin intensif, mulai dari pengembangan model hingga mekanisme replikasi praktik baik. Peningkatan perhatian global terhadap keuangan berkelanjutan dipicu oleh kesadaran yang meningkat akan dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan dan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, APBN berkelanjutan menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologi dan sosial, serta dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Berbagai inisiatif telah dilakukan, termasuk integrasi target capaian SDGs dalam APBN, *climate budgeting*, *green bond*, *energiewende*, dan *Government Pension Fund Global*.

Namun, upaya untuk mewujudkan APBN berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan defisit anggaran, mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari eksploitasi sumber daya alam, serta memperkuat pembiayaan hijau untuk menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif adalah beberapa tantangan utama. Tantangan lainnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi APBD berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang mencakup artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari beberapa negara yang telah menerapkan APBN berkelanjutan. Studi kasus dari negara-negara tersebut diolah untuk memahami konteks, tantangan, dan hasil implementasi APBN berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep APBN Berkelanjutan

Sri Mulyani (2024) menjelaskan bahwa "Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPK) merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 yang disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan. Kebijakan Fiskal harus menjadi pondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia" (Badan Kebijakan Fiskal 2024)

Menurut SDGs Financing Hub (2023), "SDGs Financing Hub mengakselerasi pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai SDGs dengan menyinergikan sumber daya keuangan dan non-keuangan. Sumber daya keuangan tersebut di antaranya adalah APBN, APBD, Development Finance Institutions, dana korporasi, bank komersial, lembaga investasi, filantropi dan organisasi keagamaan, investor retail, dan lainnya. Sementara itu organisasi kemasyarakatan, akademisi, think-tank, komunitas, dan lainnya juga turut

berkontribusi melalui program atau kajian mereka. Hal ini diimplementasikan oleh SDGs Financing Hub, di antaranya, melalui pendataan dan kurasi proyek atau inisiatif yang relevan dengan SDGs, pemetaan tipologi dan preferensi investor atau pendana, proses matchmaking proyek/inisiatif dengan investor/pendana, serta pengukuran dan pelaporan dampak terkait SDGs". (Seknas SDGs 2023)

Nurcholis Majid (2012, seperti dikutip dalam Abdul Aziz, 2013) mendefinisikan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) sebagai kondisi pada satu periode yang dapat menjamin solvency di masa datang. Artinya, APBN dikatakan berkelanjutan jika tidak menghadapi tekanan pembiayaan yang berlebihan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang dapat mengakibatkan akumulasi utang secara terus menerus yang terlalu besar dan tidak terkendali. Selain itu, APBN juga harus memiliki surplus keseimbangan primer yang cukup memadai dan dapat memelihara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) minimal tetap (konstan) atau secara bertahap menurun sehingga memiliki ketahanan yang berkelanjutan. (Abdul Aziz 2013)

Kuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keuangan berkelanjutan mencakup dimensi: 1) mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; 2) memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; 3) secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan 4) mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Berdasar uraian diatas dapat dimaknai bahwa APBN berkelanjutan adalah kerangka anggaran negara yang dirancang untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan alokasi anggaran tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengintegrasikan prinsip analisis dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam perencanaan dan implementasi yang inklusif. APBN berkelanjutan berfungsi untuk mempercepat pembiayaan dalam mencapai SDGs dan penanganan dampak perubahan iklim. Pendekatan ini mendukung keberlanjutan fiskal serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan seimbang.

Praktik Global

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sebagai contoh, Swedia telah mengintegrasikan SDGs dalam anggaran mereka dengan memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kontribusi terhadap tujuan SDGs, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan inklusi sosial. Selain itu, Swedia juga menerapkan kebijakan Green Bonds, yaitu penerbitan obligasi hijau yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan. (Sweden's VNR 2021)

Norwegia memanfaatkan Government Pension Fund Global (GPF) atau Dana Minyak Norwegia sebagai salah satu dana investasi terbesar dan paling berkelanjutan di dunia. Dana ini dikelola oleh Norges Bank Investment Management dan berinvestasi terutama pada ekuitas global, obligasi, real estate, dan infrastruktur energi terbarukan. Strategi investasinya menekankan keberlanjutan jangka panjang dan investasi yang bertanggung jawab, dengan pedoman etika yang ketat untuk menghindari perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko lingkungan, sosial, atau tata kelola (ESG). Selain itu, dana ini secara aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Norwegia juga mengintegrasikan analisis risiko lingkungan dan sosial dalam perencanaan anggaran dan pengeluaran negara untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan. (Bank and Management 2023)

Jerman memiliki kebijakan anggaran yang berfokus pada transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Program Energiewende bertujuan untuk mengubah sistem energi negara tersebut menjadi lebih efisien dan berbasis energi terbarukan. Selain itu, Jerman mendorong penggunaan hidrogen sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi industri dan memfasilitasi perluasan jaringan listrik untuk mendukung integrasi energi terbarukan. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan, sejalan dengan Rencana Aksi Iklim 2050 Jerman. Pemerintah Jerman juga melakukan reformasi Undang-Undang Energi Terbarukan untuk mempercepat perizinan proyek energi terbarukan. Carbon Pricing, sebagaimana dinyatakan dalam "*The IEA welcomes the recently adopted Climate Action Programme 2030, which includes a carbon price in the transport and heating sectors,*" adalah kebijakan penetapan harga karbon yang mengarahkan pendapatan dari pajak karbon untuk mendukung inisiatif keberlanjutan seperti energi terbarukan dan adaptasi perubahan iklim. (International Energy Agency 2020)

World Bank (2020) Obligasi Hijau adalah instrumen pendapatan tetap yang membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan menarik minat investor yang ingin memberikan dampak sosial serta lingkungan yang terukur dan bermanfaat, sambil meraih keuntungan komersial. Pasar modal memegang peran penting dalam transisi menuju ekonomi hijau, namun banyak pasar di negara berkembang masih relatif kurang berkembang. Bank dan lembaga keuangan di negara-negara ini memiliki potensi besar untuk menurunkan jejak karbon dari pertumbuhan yang pesat dengan mengalihkan modal ke proyek-proyek yang bertanggung jawab lingkungan dan teknologi inovatif.

Berdasarkan European Environment Agency, pada tahun 2003 sumbangan green tax terhadap total penerimaan pajak di beberapa menunjukkan adalah sebagai berikut: Canada (3.99%), Denmark (10.27%), France (4.91%), Germany (7.44%), Japan (6.58%), Netherlands (8.93%), Norway (6.86%), Sweden (5.84%), United Kingdom (7.57%) dan United States (3.46%). Keberadaan green tax sangat vital, tanpa adanya pajak ini pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan konsep anggaran hijau (*Green Budgeting*) dan anggaran biru (*Blue Budgeting*) dalam APBN, yang mencakup alokasi dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, konservasi hutan, dan pengelolaan sampah. Untuk memperkuat komitmen tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan terkait instrumen keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan *Green Sukuk*, yaitu obligasi syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan di sektor lingkungan. (Humas 2018)

Integrasi SDGs dalam Anggaran

SDGs adalah agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bersama pada tahun 2030. Integrasi SDGs dalam anggaran merupakan upaya untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya publik selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Maksimalisasi dampak dari kebijakan fiskal dengan SDGs memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Pemahaman dan Pemetaan: Pemerintah perlu memahami tujuan dan target SDGs serta memetakan anggaran yang relevan dengan setiap tujuan melalui analisis anggaran dan penandaan anggaran (*budget analysis and budget tagging*). 2) Pelibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan realitas di lapangan. dan 3) Integrasi Kebijakan dan Regulasi: Memerlukan instrumen kebijakan dan regulasi yang kuat dan aplikatif. Misalnya, kebijakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan sektor Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dalam penyusunannya harus melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat, agar memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, mempertebal target capaian pembangunan berkelanjutan termasuk pengawasan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Beberapa tantangan yang melingkupi proses integrasi SDGs dalam sistem penganggaran negara adalah sebagai berikut: 1) Koordinasi antar sektor, integrasi SDGs dalam anggaran memerlukan koordinasi yang intensif dan erat antar sektor serta level pemerintahan yang berbeda. Hal ini memerlukan komitmen politik yang tinggi, terutama untuk mengatasi ego sektoral. 2) Pengukuran dan indikator, pengukuran memerlukan indikator penilaian yang relevan, detail, dan konkret untuk menghindari perbedaan pemahaman mengenai setiap indikator yang ditetapkan. 3) Pelaporan akurat, pelaporan yang akurat bisa menjadi tantangan, terutama jika data yang dibutuhkan tidak tersedia, kurang akurat, atau tidak kredibel.

Penerapan Prinsip ESG dalam Investasi

Istilah ESG atau Environmental, Social, and Governance merujuk pada seperangkat standar yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan berdasarkan tiga kriteria utama.

Menurut OECD (2022), ESG mengacu pada proses mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko untuk mencapai keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan. Terminologi ESG sering kali dikaitkan dengan program keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan swasta dalam pendanaan, investasi, dan aspek lainnya sebagai bentuk pelaporan kepada publik. (Sofia 2024)

Konsep ESG pada awalnya dikembangkan untuk menilai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam dunia investasi. ESG bertujuan untuk mendukung keberlanjutan sehingga tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial semata. ESG mengevaluasi dampak investasi dari berbagai aspek, yaitu Lingkungan, memastikan keberlangsungan ekosistem alam dengan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sosial, investasi harus berkontribusi pada peningkatan layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, mengurangi angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. dan Tata kelola, investasi harus mencerminkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan inklusivitas, terutama dalam pengelolaan anggaran.

Bagi APBN, penerapan prinsip ESG menjadi penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang. Dukungan dunia investasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memberikan dampak positif bagi APBN yang berkelanjutan. ESG sangat penting bagi APBN, terutama dalam hal akses ke pembiayaan internasional. Dalam satu dekade terakhir, setelah penandatanganan Perjanjian Paris, banyak lembaga keuangan global yang diprakarsai oleh negara-negara maju seperti Prancis dan Jerman, telah mensyaratkan penerapan prinsip ESG sebagai syarat untuk akses pembiayaan.

APBN berkelanjutan juga akan meningkatkan citra positif dengan dipandang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keberlanjutan, karena pemerintah berinvestasi dalam proyek-proyek yang memenuhi standar ESG. Salah satu contohnya adalah Norwegia, yang melalui Government Pension Fund Global (GPF), menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ESG dapat diterapkan dalam pengelolaan dana negara. Dana ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa investasi tidak merugikan lingkungan dan aspek sosial.

Benang merah dari konsep ESG adalah bahwa ESG merupakan seperangkat standar yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dalam investasi dan pengelolaan aset. ESG tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka panjang, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Penerapan prinsip ESG menjadi semakin penting, terutama bagi negara-negara yang ingin mengakses pembiayaan internasional dan memperkuat citra sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan.

Dalam penyusunan atau pengelolaan APBN, pemerintah perlu menerapkan prinsip ESG untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Fokus pada dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial jangka pendek dan jangka panjang, tetapi juga untuk memperkuat akses pembiayaan internasional dan meningkatkan citra positif sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan.

Transisi Energi dan Kebijakan Anggaran

Transisi Energi

Huber (2009, seperti dikutip dalam Riyanto, 2024) menyatakan bahwa transisi energi merupakan perubahan fundamental yang melibatkan sumber daya paling berharga dalam dua abad terakhir. Modus eksplorasi, eksploitasi, pengaturan, dan pemanfaatan energi sangat menentukan bagaimana masyarakat kita ditata. Sistem energi fosil, yang memungkinkan industrialisasi dan selanjutnya mengubah dunia yang dikenal, merupakan dasar dari formasi sosial modern. (Riyanto 2024)

Transisi energi adalah upaya untuk menekan risiko pemanasan global yang berpotensi mengancam kehidupan yang layak di masa mendatang. Ini merupakan jalan menuju transformasi sektor energi global menjadi nol-karbon, yang mengacu pada pergeseran dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil (gas alam, minyak, dan batu bara) ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan baterai lithium-ion. Menurut catatan *International Renewable Energy Agency* (IRENA), transisi energi adalah transformasi dari energi berbasis bahan bakar fosil menjadi energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, transisi energi bukanlah hal baru dalam sejarah dunia. (Husen Mulachela 2022)

António Guterres, The Secretary-General *outlines five critical actions the world needs to prioritize now to transform our energy systems and speed up the shift to renewable energy - "because without renewables, there can be no future". five ways to jump-start the renewable energy transition now. make renewable energy technology a global public good, improve global access to components and raw materials, level the playing field for renewable energy technologies, shift energy subsidies from fossil fuels to renewable energy, and triple investments in renewables.* Lima tindakan itu adalah jadikan teknologi energi terbarukan sebagai barang publik global, meningkatkan akses global terhadap komponen dan bahan baku, menyeimbangkan persaingan untuk teknologi energi terbarukan, mengalihkan subsidi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dan tiga kali lipat investasi dalam energi terbarukan. (United Nation 2022)

Sebagai komitmen terhadap tindakan iklim yang berani, pinjaman berbasis kebijakan aksi iklim pertama ADB sebesar \$250 juta, yang disetujui pada tahun 2022 dan disiapkan bersama dengan Agence Française de Développement, akan mendukung Filipina untuk mengembangkan, melaksanakan, dan membiayai pendekatan holistik dalam menghadapi perubahan iklim dengan beralih ke jalur rendah karbon, memperkuat kemampuan sektor-sektor rentan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan konservasi sumber daya daratan dan laut.

Merujuk pada hal di atas Transisi Energi dapat diartikan proses perubahan penggunaan sumber energi fosil yang berkarbon tinggi seperti batubara dan minyak bumi dengan mengganti sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan serta terbarukan seperti tenaga angin, Surya, dan biomassa. tujuan utamanya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia harus mempercepat transisi energi dengan mengalihkan subsidi dari energi fosil ke energi terbarukan, meningkatkan investasi dalam teknologi

hijau, dan memastikan akses global terhadap bahan baku energi terbarukan. Hal ini esensial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melawan perubahan iklim, dan memastikan keberlanjutan energi di masa depan.

Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran penting untuk mendukung transisi energi dengan mengalokasikan dana untuk penelitian teknologi energi bersih, subsidi energi terbarukan melalui kebijakan *feed-in tariff* (insentif finansial kepada produsen energi terbarukan), dan penguatan infrastruktur listrik. Pemerintah juga bisa menggunakan pajak karbon untuk membiayai inisiatif ini dan mendorong pengurangan emisi. Selain itu, anggaran dapat mendukung program peningkatan kualitas SDM yang beralih dari sektor energi tradisional ke sektor energi baru.

“The Paris Agreement reaffirms that developed countries should take the lead in providing financial assistance to countries that are less endowed and more vulnerable, while for the first time also encouraging voluntary contributions by other Parties. Climate finance is needed for mitigation, because large-scale investments are required to significantly reduce emissions. Climate finance is equally important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate” (Paris Agreement, tahun). Perjanjian Paris mendorong negara-negara maju untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang kurang mampu dan lebih rentan terhadap perubahan iklim, serta untuk berpartisipasi dalam kontribusi sukarela. Pendanaan iklim sangat penting untuk dua hal: mitigasi, yang membutuhkan investasi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan adaptasi, yang memerlukan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim. (United Nations Climate Change 2016)

Praktik baik dalam kebijakan anggaran adalah Jerman memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran yang mendukung transisi energi, seperti *Energiewende*, dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini memerlukan dukungan anggaran yang signifikan, terutama dalam pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung transisi energi dengan investasi pada riset, teknologi energi bersih, subsidi energi terbarukan, penguatan infrastruktur listrik dan pemberdayaan masyarakat. pajak karbon juga dapat dimanfaatkan untuk mendanai inisiatif penerapan EBET. Selain itu, penting untuk mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat dalam pengembangan sektor energi terbarukan.

Sementara itu, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan dalam APBN yang bertujuan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa instrumen keuangan yang saat ini digunakan untuk APBN berkelanjutan di Indonesia:

1. Obligasi Hijau (Green Bonds), Indonesia telah menerbitkan obligasi hijau untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Obligasi ini menawarkan instrumen investasi bagi investor yang ingin mendukung inisiatif lingkungan.

2. Climate Budget Tagging, pemerintah menerapkan penganggaran berbasis iklim (*climate budget tagging*) untuk mengidentifikasi alokasi anggaran yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan penurunan emisi dan ketahanan iklim.
3. Pembiayaan Berbasis Kinerja (*Performance-Based Financing*), skema ini memberikan insentif kepada daerah atau lembaga yang berhasil mencapai target-target keberlanjutan, seperti pengurangan emisi atau peningkatan kualitas udara. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program lingkungan secara lebih efektif dan efisien.
4. Skema Pembiayaan Campuran (*Blended Finance*), pemerintah menggabungkan sumber dana publik dan swasta untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Blended finance digunakan untuk mengurangi risiko investasi dan menarik lebih banyak partisipasi dari sektor swasta.
5. Instrumen Pajak Hijau (*Green Tax Instruments*), pemerintah mulai mengadopsi pajak karbon dan retribusi lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong praktik ramah lingkungan. Penerimaan dari instrumen pajak hijau ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung keberlanjutan, seperti pemulihan ekosistem dan energi bersih.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup, dana ini dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, reboisasi, dan perlindungan wilayah pesisir. DAK Lingkungan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan berkelanjutan.
7. *Instrumen Blue Finance*, pendekatan pembiayaan yang bertujuan mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Proyek-proyek ini termasuk konservasi ekosistem laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Instrumen itu diantaranya:
 - a. Blue Bonds: Indonesia menerbitkan obligasi biru untuk mendanai proyek konservasi laut, perikanan berkelanjutan, dan mitigasi dampak perubahan iklim.
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan: DAK dialokasikan untuk pengelolaan wilayah pesisir, pemulihan ekosistem pesisir, dan perikanan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas daerah.
 - c. Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) di Sektor Kelautan: Pemerintah mendorong PPP untuk mengembangkan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan ramah lingkungan dan teknologi perikanan berkelanjutan.
 - d. Blue Carbon Initiatives: Inisiatif Blue Carbon fokus pada pelestarian ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun untuk mengurangi emisi karbon.
 - e. Pembiayaan Asuransi Risiko Laut (Marine Insurance): Indonesia menggunakan pembiayaan berbasis asuransi untuk melindungi sektor kelautan dan perikanan dari risiko iklim dan bencana.
8. Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP), pemerintah mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur

berkelanjutan, seperti transportasi ramah lingkungan dan infrastruktur energi terbarukan. Model PPP ini menciptakan peluang untuk berbagi risiko dan mengoptimalkan penggunaan dana publik.

Beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah untuk mendukung APBN berkelanjutan, selain yang sudah, yaitu:

1. Penerbitan *Sovereign Sustainable Bonds* adalah obligasi pemerintah untuk mendanai proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Berbeda dari Green Bonds, Sustainable Bonds juga mendukung tujuan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Negara-negara seperti Chile dan Eropa telah sukses menerbitkan obligasi ini dan menarik investor global yang berkomitmen pada ESG.

2. Pendirian Dana Investasi Khusus (*Sustainable Investment Fund*) dapat dilakukan untuk mendukung proyek berkelanjutan di sektor infrastruktur, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan air. Dana ini dikelola oleh entitas publik atau semi-publik dengan standar ESG ketat. Contohnya, Dana Investasi Hijau di Inggris (Green Investment Bank) menarik investasi swasta melalui skema co-funding untuk energi bersih.

3. Green Sukuk Berbasis Komunitas adalah instrumen keuangan yang melibatkan masyarakat lokal dalam penerbitannya untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Dengan partisipasi komunitas, Green Sukuk ini meningkatkan penerimaan dana serta kesadaran akan pentingnya proyek ramah lingkungan.

4. Pengebangan *platform crowdfunding* untuk proyek SDGs, memungkinkan masyarakat dan investor kecil berkontribusi pada proyek pembangunan berkelanjutan. Contohnya, platform crowdfunding energi terbarukan di Eropa telah sukses mendanai berbagai proyek skala kecil.

5. Penguatan penggunaan dana filantropi dan hibah internasional, optimalisasi dana filantropi dan hibah internasional yang mendukung SDGs dapat menambah sumber pembiayaan. Pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan yayasan, lembaga non-pemerintah, dan donor untuk mendanai proyek berkelanjutan.

6. Mengembangkan manajemen pengelolaan utang yang lebih baik dan bijak, Indonesia memiliki pengalaman pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menerapkan *optimum debt management*, salah satunya melalui teknik *debt to nature swap*, yakni menukar utang dengan pelestarian hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

APBN Berkelanjutan merupakan kerangka anggaran negara yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan alokasi anggaran mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem alam dan kesejahteraan sosial. APBN Berkelanjutan mengadopsi pendekatan yang menggabungkan analisis dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam proses perencanaan dan implementasi anggaran.

Di tingkat global, berbagai negara seperti Swedia, Norwegia, dan Jerman telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan SDGs dalam anggaran negara mereka,

menggunakan instrumen seperti *green bonds* dan *carbon pricing* untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Indonesia juga telah memulai penerapan *Green Budgeting* dan *Blue Budgeting* dalam APBN serta menerbitkan Green Sukuk dan *Blue Bonds* untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan APBN Berkelanjutan di Indonesia, seperti koordinasi antar-sektor, keterbatasan pengukuran dan indikator keberlanjutan, serta kesulitan dalam pelaporan akurat. Tantangan ini perlu diatasi dengan upaya kolaboratif dan penguatan regulasi yang lebih inklusif.

Adapun saran yaitu :

Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan fiskal, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan fiskal yang secara eksplisit mencerminkan prinsip keberlanjutan, termasuk mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini bisa dilakukan dengan mengadopsi dan mengembangkan kerangka kerja Green Budgeting dan meningkatkan alokasi untuk energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, serta infrastruktur hijau.

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-sektor, koordinasi yang lebih erat antara kementerian dan lembaga, serta antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan menghindari konflik kepentingan sektoral. Pemerintah juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan.

Memperkuat pengukuran dan indikator keberlanjutan, pemerintah harus mengembangkan indikator keberlanjutan yang jelas, detail, dan terukur untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program pembangunan yang dibiayai APBN. Pelaporan yang akurat dan berbasis data yang kredibel juga perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah perlu menyusun peta jalan APBN Berkelanjutan, untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari eksploitasi sumber daya alam, pemerintah perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan, termasuk memperkuat pembiayaan hijau melalui instrumen seperti green bonds, green sukuk, dan blue bonds. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi swasta dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan teknologi inovatif.

Mendorong Pemerintah Daerah untuk Mengadopsi APBD Berkelanjutan, pemerintah pusat harus memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang mengadopsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkelanjutan, misalnya melalui peningkatan akses terhadap dana transfer khusus baik itu dana alokasi khusus (DAK) maupun dana insentif daerah (DID) untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. 2013. "Menjaga APBN Agar Tetap Sustain." *Fiskal.Kemenkeu.Go.Id* 1959:32.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 4 (2024) 1949 – 1960 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i4.591

- Badan Kebijakan Fiskal. 2024. "Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Fiskal 2025." Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. 2024.
- Bank, Norges, and Investment Management. 2023. "Responsible Investment Government Pension Fund Global."
- Humas, KLHK. 2018. "Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia." Ppid.Menlhk.Go.Id. 2018.
- Husen Mulachela. 2022. "Transisi Energi: Pengertian, Manfaat, Dan Teknologinya." Universitaspertamina.Ac.Id. 2022.
- International Energy Agency, IEA. 2020. "IEA Policy Review Commends Germany's Ambitious Efforts to Advance Its Clean Energy Transition." Iea.Org. 2020.
- Riyanto, Geger at al. 2024. *Pergulatan Transisi Energi Berkeadilan: Satu IsU Beragam Dilema*. Edited by Geger Riyanto. Jakarta: Gramedia.
- Seknas SDGs. 2023. "SDGs Financing Hub: Akselerator Pembiayaan Berkelanjutan Untuk SDGs." Sdgs.Bappenas.Go.Id. 2023
- Sofia, Aya. 2024. "Mengenal Konsep ESG: Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan." Sparse.Feb.Ugm.Ac.Id. Yogyakarta. 2024.
- Sweden's VNR. 2021. "Voluntary National Review 2021." Sustainabledevelopment.Un.Org. 2021.
- Unaited Nations. n.d. "Five Ways to Jump-Start the Renewable Energy Transition Now." Un.Org.
- United Nations Climate Change. 2016. "The Paris Agreement." Unfccc.Int. 2016.
- ADB. (2024). Pillar of Progress.
- DJKN Kemenkeu. (2016). Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia.
- DJPPR Kemenkeu. (2019). Pemerintah Terbitkan Green Sukuk Retail Pertama di Dunia, Sukuk Tabungan Seri ST006. Diakses dari
- DJPB Kemenkeu. (2021). DAK Fisik: Informasi Dana Transfer.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Green Tax Versus Green Incentive.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Blended Finance: Antara Manfaat dan Tantangan dalam Penerapannya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Blue Finance untuk Pembiayaan Infrastruktur.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Indonesia Menjadi Contoh Internasional dalam REDD+ dan RBP Emisi Karbon.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Climate Budget Tagging.
- World Bank. (2023). Green Loans: Financing the Transition to a Low-Carbon Economy.
- World Bank. (2024). Indonesia Sustainable Oceans Program.
- CrowdfundRes. (2020). CrowdfundRes: The European crowdfunding network.